

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

20
25



BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Cepat, Akurat, Manfaat



Baketrans



baketrans.kemhub.go.id



baketrans.kemhub.go.id

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I *AUDITED* TAHUN 2025

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025



Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.2/RW.1,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta,

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,



Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta,

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,



Irjen Pol. Capt, Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

No.	Nama	Paraf
1	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	
2	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	
3	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	
4	Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	
5	Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	55
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	69
VI. Lampiran	75



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

No.	Nama	Paraf
1	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	
2	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	
3	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	
4	Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	
5	Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 306.341.062 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 90.370.825.415 atau mencapai 72,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 125.391.269.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset yang dicatat dan disajikan sebesar Rp 66.752.671.174 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 6.203.030; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 60.094.667.107 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 6.651.801.037. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 6.645.981.489 dan Rp. 60.106.689.685.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar sampai dengan periode per 31 Desember 2025. Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 37.790.962 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 96.042.269.612 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (96.004.478.650); Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

sebesar Rp.(40.153.900); Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0; Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp.63.404.000 sehingga Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 23.250.100. Pos Luar Biasa sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(95.981.228.550).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 66.023.433.882 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (95.981.228.550) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(0) dan transaksi antar entitas senilai Rp. 90.064.484.353 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 60.106.689.685.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk *Audited* Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CAT	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	306.341.062	0,00	1.205.291.397
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	306.341.062	0,00	1.205.291.397
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	47.087.041.000	46.174.873.348	98,06	41.488.904.048
Belanja Barang	B.4	75.844.364.000	43.539.428.237	57,41	139.746.630.921
Belanja Modal	B.5	2.459.864.000	656.523.830	26,69	6.807.745.011
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		125.391.269.000	90.370.825.415	72,07	188.043.279.980

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan*



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : https://baketrans.dephub.go.id

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CAT	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.5	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Beban dibayar dimuka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	6.203.030	9.283.890
Persediaan yang Belum Diregister	C.1.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		6.203.030	9.283.890
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	-	-
Tanah Belum Diregister			
Peralatan dan Mesin	C.2.2	43.243.630.228	53.061.892.090
Peralatan dan Mesin Belum Diregister			
Gedung dan Bangunan	C.2.3	48.664.878.893	48.664.878.893
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	13.687.694.174	13.687.694.174
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister			
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.506.522.185	2.506.522.185
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(48.008.058.353)	(51.947.655.955)
Jumlah Aset Tetap		80.094.667.107	85.973.331.367
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	1.192.384.000	2.027.384.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya			
Aset Lain-Lain	C.4.2	6.645.981.489	-
Aset Lainnya Belum Diregister		266.213.400	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(1.472.757.852)	(1.986.565.375)
Jumlah Aset Lainnya		6.651.801.037	40.818.625
JUMLAH ASET		86.752.671.174	86.023.433.882
KEWAJIBAN	C.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	6.645.981.489	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.3	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.645.981.489	-
JUMLAH KEWAJIBAN		6.645.981.489	-
EKUITAS	C.6		
Ekuitas		60.106.689.685	66.023.433.882
JUMLAH EKUITAS		60.106.689.685	66.023.433.882
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		66.752.671.174	66.023.433.882

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan*



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : https://baketrans.dephub.go.id

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CAT	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	37.790.962	-
JUMLAH PENDAPATAN		37.790.962	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	46.174.873.348	41.488.904.048
Beban Persediaan	D.3	829.984.120	3.564.800.829
Beban Barang dan Jasa	D.4	34.796.762.922	63.275.197.557
Beban Pemeliharaan	D.5	5.155.430.537	9.491.677.067
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.672.718.108	63.405.671.578
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.412.500.577	7.824.383.995
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		96.042.269.612	189.050.635.074
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(96.004.478.650)	(189.050.635.074)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(40.153.900)	(1.002.522.717)
Pendapatan pelepasan aset Non Lancar		205.146.100	86.903.400
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		245.300.000	1.089.426.117
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		63.404.000	1.118.387.997
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		63.404.000	1.118.387.997
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		23.250.100	115.865.280
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(95.981.228.550)	(188.934.769.794)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.13	(95.981.228.550)	(188.934.769.794)

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CAT	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	66.023.433.882	68.086.519.093
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(95.981.228.550)	(188.934.769.794)
IAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	-	33.696.000
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	(33.696.000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	90.064.484.353	186.837.988.583
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.916.744.197)	(2.063.085.211)
EKUITAS AKHIR	E.5	60.106.689.685	66.023.433.882

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Irjen Pol. Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar.
NRP 73010684

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Transportasi

Badan Kebijakan Transportasi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya transportasi yang handal melalui kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, Jakarta.

Badan Kebijakan Transportasi bertugas menyelenggarakan analisis serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi melalui penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi, serta melaksanakan fungsi administrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Kebijakan Transportasi

berkomitmen dengan visi ***"Badan Kebijakan Transportasi yaitu terselenggaranya Rekomendasi Kebijakan yang Cepat, Akurat, dan Manfaat dalam mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi"***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kebijakan transportasi yang inklusif, berkeadilan, aman, selamat dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
- Memberikan rekomendasi kebijakan transportasi yang mendukung ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi, merata, dan mendukung hilirisasi serta sektor ekonomi utama.
- Memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia analis kebijakan agar adaptif terhadap perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan, dan keberlanjutan.
- Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka perkuatan konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.
- Memantapkan tata kelola penyusunan dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi yang transparan, kolaboratif, serta berbasis data dan evidensi ilmiah.
- Memberikan rekomendasi kebijakan penerapan transportasi yang berwawasan lingkungan, efisien energi, dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

*Program
Prioritas
Nasional*

A.3. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek yang bersifat signifikan dan strategis untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya. Pembangunan infrastruktur Tahun 2025, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur

dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Dari Tujuh Prioritas Nasional (PN) yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2025 Badan Kebijakan Transportasi mendukung prioritas nasional ke-V dengan fokus memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tidak Ada

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Tidak Ada

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pada tahun 2025 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis) Prioritas Nasional V di antaranya melalui program prioritas Sistem Transportasi Pendukung Logistik yang dikembangkan pada 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut

Prioritas Nasional terkait Observasi Tataan Transportasi Kawasan Aglomerasi di Ibu Kota Nusantara dan Evaluasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Transportasi dalam Peningkatan Pariwisata Nasional

d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Tidak Ada

e. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tidak Ada

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kebijakan Transportasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Kebijakan Transportasi yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Kebijakan Transportasi adalah 5 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

No	Kode Satker	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	288752	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1				1
2	288944	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1				1
3	288951	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1				1
4	414267	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	1				1
5	634171	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1				1
Jumlah			5				5

Tabel A.1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAKPA

A.5. Basis Akuntansi

Badan Kebijakan Transportasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada PMK Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Deputi Administrasi BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tabel A.2 Perhitungan Penyisihan Piutang

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Tabel A.4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan revisi Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) kewenangan DJA sebanyak tujuh kali, dari pagu awal sebesar Rp 116.772.728.000 setelah revisi terakhir menjadi Rp 125.391.269.000. Berikut pagu dan realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 beserta *timeline* Revisi DIPA yang telah dilakukan Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

NO	URAIAN REVISI	JENIS BELANJA			Total Pagu Anggaran	Keterangan Tambahan
		51 Belanja Pegawai	52 Belanja Barang	53 Belanja Modal		
1	Pagu Awal	47.087.041.000	67.159.758.000	2.525.929.000	116.772.728.000	DIPA 2025
2	Revisi DJA 1	47.087.041.000	67.159.758.000	2.525.929.000	116.772.728.000	(Efisiensi Anggaran Inpres 1 Tahun 2025) sebesar Rp45.754.609.000
3	Revisi DJA 2 (ralat kode blokir)	47.087.041.000	67.159.758.000	2.525.929.000	116.772.728.000	Ralat Kode Blokir semula 5 menjadi kode Blokir A Puskas Sarana
4	Revisi DJA 3 (Relaksasi Blokir Tahap I)	47.087.041.000	67.159.758.000	2.525.929.000	116.772.728.000	Buka blokir catatan hal IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional mendasar sebesar Rp5.646.785.000
5	Revisi DJA 4 Bulan April 2025	47.087.041.000	71.806.509.000	2.459.864.000	121.353.414.000	Pergeseran antar unit Eselon I (BKT, BPSDM dan Sekretariat Jenderal Kemenhub) sebesar Rp4.580.686.000 untuk kegiatan MPD
6	Revisi DJA 5 Bulan Agustus 2025	47.087.041.000	71.806.509.000	2.459.864.000	121.353.414.000	Relaksasi blokir sebesar Rp647.220.000 Pada Puskas KKT
7	Revisi DJA 6 Bulan Oktober 2025	47.087.041.000	75.844.364.000	2.459.864.000	125.391.269.000	Pergeseran Anggaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke 4 satker Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp4.037.855.000
8	Revisi DJA ke 7 Bulan Desember 2025	47.087.041.000	75.844.364.000	2.459.864.000	125.391.269.000	Pembukaan Blokir Pada Satker Puskas LLAT untuk kegiatan MPD Akhir Tahun sebesar Rp.5.706.112.000

Uraian	2025		
	PAGU	REALISASI	SISA PAGU
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja			
Belanja Pegawai	47.087.041.000	46.174.873.348	912.167.652
Belanja Barang	75.844.364.000	43.539.428.237	32.304.935.763
Belanja Modal	2.459.864.000	656.523.830	1.803.340.170
Jumlah Belanja	125.391.269.000	90.370.825.415	35.020.443.585

Tabel B.1 Pagu dan realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi

1. Revisi DIPA (DJA) pertama terkait Pengesahan Revisi Anggaran Efisiensi Belanja di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-1) pada tanggal 21 Februari 2025;
2. Revisi DIPA (DJA) Kedua terkait Ralat Kode Blokir pada satker Pusjak Sarana dengan kode blokir semula 5 menjadi kode blokir A (Revisi Ke-2) pada tanggal 14 Maret 2025;
3. Revisi DIPA (DJA) Ketiga terkait Buka blokir catatan hal IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional mendasar sebesar Rp5.646.785.000 pada DIPA Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan TA 2025 (Revisi Ke-3) pada tanggal 24 Maret 2025;
4. Revisi DIPA (DJA) keempat adalah Pergeseran antar unit Eselon I (BKT, BPSDM dan Sekretariat Jenderal Kemenhub) sebesar Rp4.580.686.000 untuk kegiatan MPD. Pengesahan Revisi Anggaran antar-Unit Eselon I pada tanggal 11 April 2025;
5. Revisi DIPA (DJA) kelima adalah Relaksasi blokir sebesar Rp647.220.000 Pada Pusat Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi terkait kegiatan keamanan dan keselamatan transportasi. Pengesahan Revisi DIPA ke 5 pada tanggal 21 Agustus 2025;
6. Revisi DIPA (DJA) keenam adalah pergeseran anggaran antar unit Eselon I (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada 4 satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi) untuk memenuhi kekurangan belanja tugas dan fungsi sebesar Rp4.037.855.000. Pengesahan Revisi DIPA ke 6 pada tanggal 13 Oktober 2025;
7. Revisi DIPA (DJA) ketujuh adalah Relaksasi blokir sebesar Rp 5.706.112.000 Pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas Dan Angkutan Transportasi untuk kegiatan MPD. Pengesahan Revisi DIPA ke 7 pada tanggal 8 Desember 2025.

Satker	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	TOTAL (Rp)
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	47.087.041.000	34.448.724.000	2.459.864.000	Rp 83.995.629.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-	7.899.084.000	-	Rp 7.899.084.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-	8.604.978.000	-	Rp 8.604.978.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	-	17.262.936.000	-	Rp 17.262.936.000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-	7.628.642.000	-	Rp 7.628.642.000
Jumlah	47.087.041.000	75.844.364.000	2.459.864.000	Rp 125.391.269.000

Tabel B.2 Pagu Belanja masing-masing Satker Badan Kebijakan Transportasi

Realisasi Pendapatan
Rp. 306.341.062

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025, Badan Kebijakan Transportasi memiliki Pendapatan Bukan Pajak (tidak ditetapkan target pendapatan dalam tahun 2025) sebesar Rp. 306.341.062 yang berasal dari :

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 100.690.399 sebagai berikut:
 - Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp62.900.000 merupakan pendapatan yang berasal dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu – berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Pembicara dan MC Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Glorifikasi Capaian Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Transportasi.
 - Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 37.452.500 merupakan pendapatan sewa yang berasal dari sewa kantin Badan Kebijakan Transportasi.
 - Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 337.899 merupakan potongan spm yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi.
- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

- Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 72.183.000 merupakan hasil dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan operasional Nissan X-Trail.2.0 2WD MT wana abu-abu tua metalik nomor identitas produk I-1182336
- Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar Rp 100.797.100 terdiri dari Rp. 100.293.100 merupakan hasil dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Rp. 504.000 merupakan pengembalian belanja tahun 2024 atas pemeriksaan audit kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025.
- Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
 - Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin berupa 1 (satu) paket scrap/besi tua/limbah padat peralatan dan mesin seharga Rp32.670.000 dengan kode billing 820251001455402 dan kode NTPN 3F5452G503DHT0PA tanggal 1 Oktober 2025.
 - Pendapatan anggaran lain-lain, penerimaan negara bukan pajak lainnya berupa kelebihan setoran GU Nihil sebesar Rp.563 dengan kode billing No. 702512314184232 dan kode NTPN 339382CPTEN7PSH8 tanggal 31 Desember 2025

Pendapatan Negara Bukan Pajak			
Uraian	NTPN/No Risalah Lelang	Tanggal Bayar	Jumlah
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi			
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	23E877QLV2ACBBKQ	18/04/2025	62.900.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1. 7E9FB55DFIRPVDA 2. 8562A1JNG8I8AT9C 3. 14B336U8F80IPQ4F 4. 4219A81QVDE6BS2U 5. 6FC987QLV2IV61DB 6. EA04C55DFIRPV3G7 7. CB5861JNG818B18 8. C6B022G5034KOOBL 9. 7449D55DFIRPVG92 10. 732D12G5034KONSS 11. 49ACC1JNG8IRG18N 12. A94EEONA0E3B6KJP	04-22/07/2025	37.452.500
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Potongan SPM	2025	337.899
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi			
Penjualan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan operasional Nissan X-Trail 2.0 2WD MT warna abu-abu tua metalik nomor identitas produk I-1182336	98/07.01/2025-01	27/05/2025	72.183.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan			
Penjualan Peralatan dan Mesin berupa HBL RL-218/07.01/2025-01	3F5452G503DHT0PA	01/10/2025	32.670.000
Pendapatan lain-lain	339382CPTEN7PSH8	31/12/2025	563
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi			
Penjualan Peralatan dan Mesin berupa Jeep dengan nomor B 2551 DQ	6111A7QLV2GLQK78	26/06/2025	23.043.000
Penjualan Paket peralatan dan mesin, lemari, printer, pc, dispenser, kursi, buku, brankas, dsb	CE9A87QLV2GF272O	18/08/2025	6.170.100
Penjualan Mobil Xtrail 2012	0BB25U8F8CQQVJN	13/11/2025	71.080.000
Pengembalian Belanja atas temuan LHA Itjen Tahun Anggaran 2024	FEEC52G503DV8VNO	15/10/2025	504.000
TOTAL			306.341.062

Tabel B.3 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	337.899	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	563	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	37.452.500	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	63.404.000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	205.146.100	-
Jumlah	-	306.341.062	-

Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

Rincian realisasi pendapatan per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A. 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	100.690.399
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	72.183.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	32.670.563
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	100.797.100
Jumlah	306.341.062

Tabel B.5 Rincian Rincian realisasi pendapatan per satuan kerja

Realisasi Belanja
Rp.90.370.825.415

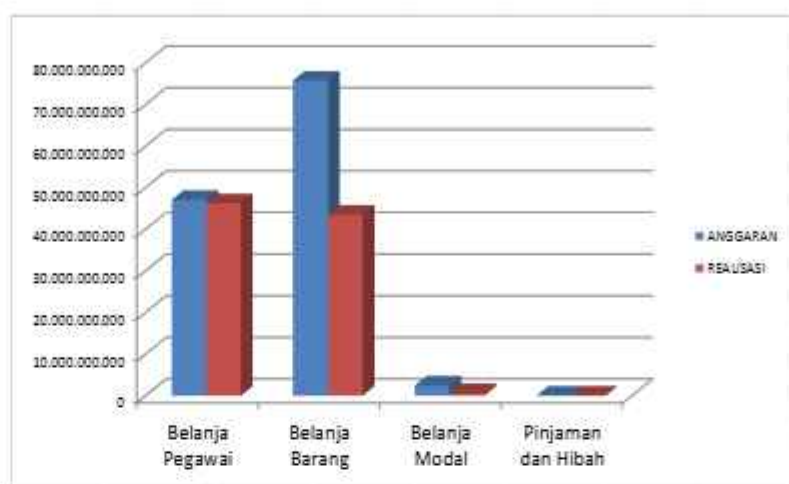
B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 90.370.825.415 atau 72,07% dari target realisasi belanja Badan Kebijakan Transportasi sebesar 99,3% hal ini dikarenakan adanya Anggaran Belanja pada Blokir Anggaran Sesuai dengan Inpres I Tahun 2025 sebesar Rp. 33.754.492.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	47.087.041.000	46.174.873.348	98,06
Belanja Barang	75.844.364.000	43.539.428.237	57,41
Belanja Modal	2.459.864.000	656.523.830	26,69
Total Belanja Kotor	125.391.269.000	90.370.825.415	72,07
Total Belanja	125.391.269.000	90.370.825.415	72,07

Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik B.1 Komposisi anggaran dan realisasi belanja

Sedangkan realisasi belanja per satuan kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

SATUAN KERJA	2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	83.995.629.000	71.344.875.264	84,94
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	7.899.084.000	1.275.269.308	16,14
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	8.804.978.000	2.479.993.982	28,82
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	17.262.936.000	13.552.229.864	78,50
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7.628.642.000	1.718.456.997	22,53
Sub Total	125.391.269.000	90.370.825.415	72,07

Tabel B.7 Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2025

Belanja Pegawai
Rp. 46.174.873.348

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas ekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang erkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.174.873.348 dan Rp. 41.488.904.048. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan

sebesar 1,92 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai dan yang berasal dari mutasi masuk pegawai, perekrutan CPNS dan PPPK baru tahun 2025.

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	12.688.898.920	12.443.984.850	2,0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	196.877	199.208	(1,2)
Belanja Tunjangan Suami Istri PNS	743.049.320	740.441.274	0,4
Belanja Tunjangan Anak PNS	188.073.874	192.194.672	(2,1)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	477.780.000	477.365.000	0,1
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.427.129.000	1.158.849.000	23,2
Belanja Tunjangan PPh PNS	148.951.072	135.990.746	9,5
Belanja Tunjangan Beras PNS	586.964.100	594.568.200	(1,3)
Belanja Uang Makan PNS	2.133.164.000	1.085.242.000	96,6
Belanja Tunjangan Umum PNS	271.480.000	357.445.000	(24,0)
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.867.320.500	1.045.608.800	(0,8)
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29.893	16.646	(0,8)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	106.508.600	61.312.280	(0,7)
Belanja Tunjangan Anak PPPK	24.881.588	13.632.672	(0,8)
Belanja Tunjangan Umum PPPK	41.885.000	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	194.420.000	173.990.000	(0,1)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	96.970.380	53.373.540	(0,8)
Belanja Uang Makan PPPK	373.010.000	110.645.000	(2,4)
Belanja Uang Lembur	509.467.000	299.380.000	-
Belanja Uang Lembur PPPK	135.965.000	10.075.000	
Bel. Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	21.665.310.705	21.011.943.991	(0,0)
Khusus/Kegiatan/PPPK	2.537.757.218	1.523.392.850	(0,7)
Jumlah Belanja Kotor	46.219.213.047	41.489.650.729	(0,1)
Pengembalian Belanja Pegawai	44.339.699	746.681	
Jumlah Belanja	46.174.873.348	41.488.904.048	11,29

Tabel B.8 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2025 dan 2024

Belanja Barang
Rp. 43.539.428.237

B.4 Belanja Barang

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.539.428.237 dan Rp. 139.746.630.921

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	9.779.056.542	12.353.647.488	(20,84)
Belanja Barang Non Operasional	2.178.082.172	10.388.939.909	(79,03)
Belanja Persediaan	826.903.260	3.574.084.719	(76,86)
Belanja Jasa	22.642.621.408	40.532.610.160	(44,14)
Belanja Pemeliharaan	5.460.781.797	9.491.677.067	(42,47)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.647.072.426	60.230.804.832	(95,61)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	25.701.779	3.188.536.746	
Jumlah Belanja Kotor	43.560.219.384	139.760.300.921	(68,83)
Pengembalian Belanja	20.791.147	13.670.000	
Jumlah Belanja	43.539.428.237	139.746.630.921	(68,84)

Tabel B.9 Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 68,84% persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan kebijakan efisiensi belanja Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

SATUAN KERJA	2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	34.448.724.000	24.513.478.088	71,18
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	7.899.084.000	1.275.269.308	16,14
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	8.604.978.000	2.479.993.982	28,82
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	17.262.936.000	13.552.229.884	78,50
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7.628.642.000	1.718.456.997	22,53
Total Belanja	75.844.364.000	43.539.428.237	57,41

Tabel B.10 Rincian realisasi belanja barang per satuan kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Belanja Modal
Rp. 656.523.830

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 656.523.830 dan Rp. 6.807.745.011. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.523.830	6.807.745.011	(90,36)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0		0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	656.523.830	6.807.745.011	(90,36)
Pengembalian	-	0	-
Jumlah Belanja	656.523.830	6.807.745.011	(90,36)

Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 90,36% dibandingkan TA 2024, Hal ini disebabkan kewajiban efisiensi belanja Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

SATUAN KERJA	2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	2.459.864.000	656.523.830	26,69
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-	-	0,00
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-	-	0,00
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-	-	0,00
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-	-	0,00
Total Belanja	2.459.864.000	656.523.830	26,69

Tabel B.12 Rincian realisasi belanja modal per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,. Badan Kebijakan Transportasi sampai saat ini tidak memiliki aset tanah.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Tabel B.13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 656.523.830*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 656.523.830, mengalami penurunan 89,60% bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 6.011.569.761. Hal ini disebabkan kebijakan efisiensi belanja di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran 2025,

sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.523.830	6.011.569.761	107,64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Perangaran		0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	656.523.830	6.011.569.761	107,64
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	656.523.830	6.011.569.761	(89,08)

*Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024*

realisasi belanja modal peralatan dan mesin per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi.

SATUAN KERJA	REALISASI
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	656.523.830
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Total Belanja	656.523.830

Tabel B.15 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Gedung Bangunan
Rp. 0.*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan sebesar Rp. 796.175.250.

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	0	796.175.250	0,00%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	796.175.250	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	796.175.250	0,00

*Tabel B.16 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024*

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, & Jaringan
Rp.0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal			0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Tabel B.17 Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan 2024

Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Tabel B.18 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024

Aset Lancar
Rp. 6.203.030

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 . Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.203.030 dan Rp. 9.283.890. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan TA 2024

Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.2 Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp.0

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.3 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan TA 2024

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp. 0

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu uang kas yang berada didalam rekening bank yang belum ditarik atau dicairkan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.4 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan TA 2024

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.5 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker

Piutang Bukan
Pajak
Rp. 0

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.6 Perbandingan Rincian Piutang PNB TA 2025 dan 2024

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp. 0

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

Tabel C.7 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

Bagian Lancar TPA
Rp.0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	JK Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tabel C.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
TA 2025

Beban Dibayar Di
Muka
Rp. 0

C.1.8 Beban Dibayar Di Muka

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

JENIS	TH 2025	TH 2024
Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

*Tabel C.9 Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2025 dan 2024*

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp. 0*

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

JENIS	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.10 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Persediaan
Rp. 6.203.030*

C.1.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.203.030 dan Rp. 9.283.890

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

JENIS	TH 2025	TH 2024	Mutasi
Barang Konsumsi	6.203.030	9.283.890	(3.080.860)
Bahan Baku	-	-	-
Suku Cadang	-	-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat	-	-	-
Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	6.203.030	9.283.890	(3.080.860)

Tabel C.11 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Rincian Persediaan berupa Alat Tulis Kantor di Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut :

JENIS	NILAI
BARANG KONSUMSI	
Alat Tulis	452.000
Penjepit Kertas	496.390
Penghapus/Korektor	111.000
Ordner Dan Map	608.200
Alat Perekat	204.900
Staples	562.800
Isi Staples	236.100
Kertas HVS	1.561.990
Berbagai Kertas	576.550
Amplop	74.400
Kertas Dan Cover Lainnya	150.000
Tinta/Toner Printer	1.091.000
USB/Flash Disk	77.700
Jumlah Barang Konsumsi	6.203.030

Tabel C.12 Rincian Persediaan TA 2025

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	982.350
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	466.200
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.744.800
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	1.713.200
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1.296.480
Jumlah	6.203.030

Tabel C.13 Nilai Persediaan per satker di lingkungan
Badan Kebijakan Transportasi

Persediaan yang
belum diregister
Rp.0

C.1.10.1. Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	TH 2025	TH 2024
Persediaan Yang Belum Diregister	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.14 Nilai Persediaan yang belum diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.15 Nilai Persediaan yang belum diregister per satker

Persediaan yang belum diregister pada neraca dikarenakan terdapat perbedaan periode tanggal dokumen Kwitansi/BAST dengan tanggal buku pendetailan persediaan.

Aset Tetap

Rp. 60.094.667.107

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.094.667.107 dan Rp.65.973.331.367. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Kebijakan Transportasi berupa, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp. 0

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Tabel C.16 Mutasi Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin
Rp. 43.243.630.228

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.243.630.228 dan Rp. 53.061.892.090.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	53.061.892.090
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	656.523.830
Hibah		
Transfer Masuk	Rp	-
Penggunaan Kembali Aset Tetap	Rp	283.620.000
Reklas masuk	Rp	87.613.410
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	286.213.400
Reklasifikasi keluar	Rp	-
Penghapusan	Rp	10.559.805.702
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	43.243.630.228
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(35.662.174.439)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	7.581.455.789

Tabel C.17 Mutasi Peralatan dan Mesin

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28.805.657.864
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	3.390.760.801
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	4.626.680.838
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	3.102.358.800
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	3.320.171.925
Jumlah	43.245.630.228

Tabel C.19 Aset tetap berupa peralatan dan mesin per satker
di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.027.757.240 dengan rincian:

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.656.523.830 selama tahun 2025 dan Rp.87.613.410 merupakan hasil dari kapitalisasi barang milik negara (akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 523111 menjadi aset tetap pada modul aset) berupa 7 unit AC sesuai SKET-SBKT 271 Tahun 2025 menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Kinerja pada Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025

nomor 28/LHA/IT.I/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025.

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT KANTOR	62.565.760,
2	ALAT RUMAH TANGGA	466.856.660,
3	ALAT STUDIO	27.128.750,
4	KOMPUTER UNIT	87.972.660,
5	PERALATAN KOMPUTER	12.000.000,
Jumlah		656.523.830

*Tabel C.20 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi*

- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Mutasi tambah sebesar Rp.283.620.000 berupa pengaktifan kembali BMN berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan jenis mini bus (penumpang 14 orang ke bawah) merk Toyota Kijang Innova 20.G M/T senilai Rp.283.620.000 berdasarkan Nota Dinas Kuasa Penggunaan Barang Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Nomor 126/PKST/VI/2025 hal Tindak Lanjut Penggunaan Kembali Barang Milik Negara yang Telah Dihentikan Penggunaannya.

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	283.620.000
Jumlah		283.620.000

*Tabel C.21 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi*

*Gedung dan
Bangunan
Rp. 48.664.878.893*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 48.664.878.893 dan Rp. 48.664.878.893. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	48.664.878.893
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi pencatatan	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	48.664.878.893
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(9.844.074.316)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	38.820.804.577

Tabel C.22 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 13.687.694.174

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.687.694.174 dan Rp.13.687.694.174. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan listrik.

Saldo per 31 Desember 2025	Rp13.687.694.174
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi	Rp -
Pengembangan Jaringan Listrik	Rp -
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp13.687.694.174
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	Rp (2.501.809.598)
Nilai Buku per 31 Des 2025	Rp11.185.884.576

Tabel C.23 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya
Rp. 2.506.522.165

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 2.506.522.165 dan Rp. 2.506.522.165.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 2.506.522.165
Mutasi tambah:	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Koreksi nilai	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 2.506.522.165
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 2.506.522.165

Tabel C.24 Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya berupa Pembelian Buku Perpustakaan (monografi) pada satker Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagai referensi para peneliti/perekayasa.

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	2.506.522.165
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
Jumlah	2.506.522.165

Tabel C.25 Rincian Aset Tetap Lainnya per satker

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp. 0

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(48.008.058.353)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.(48.008.058.353) dan Rp.(51.947.655.955)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	53.061.892.090	(35.662.174.439)	17.399.717.651
2	Gedung dan Bangunan	48.664.878.893	(9.844.074.316)	38.820.804.577
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.687.694.174	(2.501.809.598)	11.185.884.576
4	Aset Tetap Lainnya	2.506.522.165	-	2.506.522.165
	Akumulasi Penyusutan	117.920.987.322	(48.008.058.353)	69.912.928.969

Tabel C.26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Piutang Jangka Panjang
Rp.0*

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Badan Kebijakan Transportasi merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp. 0.*

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan Angsuran
Rp. 0*

C.3.2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih-
Piutang Jangka Panjang
Rp. 0*

C.3.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan

estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tabel C.27 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar

Aset Lainnya

Rp. 6.651.801.037

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.651.801.037 dan Rp.40.818.625. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp. 1.192.364.000

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.192.364.000 dan Rp. 2.027.384.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 1.192.364.000
2	Lisensi	Rp -
3	Hasil Kajian/Penelitian	Rp -
Jumlah Nilai		Rp 1.192.364.000

Tabel C.28 Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.027.384.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar	Rp	835.020.000
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	1.192.364.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	Rp	(1.192.364.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Tabel C.29 Mutasi Aset Tak Berwujud

Mutasi kurang berasal dari penghapusan Aset Tak berwujud pada satker Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar Rp.263.950.000, dan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar Rp.571.070.000. terlampir rincian Aset tak berwujud di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1.192.364.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	1.192.364.000

Tabel C.30 Aset tak berwujud per satker

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp. 6.645.981.489

C.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai perolehan Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.645.981.489 dan Rp. 0. Dana yang dibatasi penggunaannya (*restricted cash*) adalah kas atau setara kas yang alokasinya dikhususkan untuk tujuan tertentu, seperti jaminan kontrak, rekening dana reboisasi, dana abadi, atau dana moratorium, sehingga tidak bisa digunakan untuk operasional harian. Dana ini disajikan terpisah dari kas operasional dalam neraca, diklasifikasikan sebagai aset lancar atau tidak lancar tergantung jangka waktu penggunaannya. Rincian dana yang dibatasi penggunaannya berasal dari penampungan pembayaran kontrak akhir tahun (yang berakhir 31 Desember 2025) menggunakan skema RPATA yang kemudian dilakukan pembayaran di bulan Januari 2026 pada 3 satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	233.331.432
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	206.532.600
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	6.206.117.457
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	6.645.981.489

Tabel C.31 Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Utang Kepada Pihak Ketiga Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berupa pembayaran RPATA atas penyelesaian kontrak jasa pegawai *outsourcing* bulan Desember 2025 yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Januari 2026 dengan nomor SP2D 261330000000533 sebesar Rp. 233.331.432.

- Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Utang Kepada Pihak Ketiga Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berupa Pembayaran RPATA Termin 2 atas Kontrak Nomor PJ-PKPTIM 2 Tahun 2025 untuk Kontrak Swakelola Tipe II Pengadaan Pekerjaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Dan Pelayanan Transportasi Pada Angkutan Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026 yang berakhir kontrak per 30 Desember 2025 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Januari 2026 dengan nomor SP2D 261330000000453 sebesar Rp.206.532.600.

- Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi berupa Pembayaran RPATA atas 3 kontrak Pengolahan dan Analisis Pergerakan Orang Berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD) yang berakhir kontrak per 31 Desember 2025 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Selular, nomor SP2D 2613300000002796 dengan nilai kontrak Rp. 1.475.000.001.
2. PT. Indosat Tbk, nomor SP2D 2613300000002798, dengan nilai kontrak Rp.2.622.117.456.

3. PT. XL Axiata Tbk, nomor SP2D 261330000002797, dengan nilai kontrak Rp. 2.109.000.000.

Aset Lain-Lain
Rp. 286.213.400

C.4.3 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 286.213.400. dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Transportasi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	-
Penghapusan Dengan Cara Pemusnahan	-
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
Penghapusan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerintah	286.213.400
Saldo per 31 Desember 2025	286.213.400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(280.393.852)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.819.548

Tabel C.32 Rincian Mutasi aset lain-lain

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan terdapat pada satker Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi sebesar Rp. 262.953.900, dan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar Rp. 23.259.500.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp. (1.472.757.852)

C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. Rp. (1.472.757.852) dan Rp. (1.986.565.375) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025

adalah sebagai berikut:

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	1.192.364.000	-1.192.364.000	0
	Jumlah	1.192.364.000	-1.192.364.000	0
B.	Aset Lain-lain	286.213.400	-280.393.852	5.819.548
	Jumlah	286.213.400	-280.393.852	5.819.548
	Total	1.478.577.400	-1.472.757.852	5.819.548

Tabel C.33 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp. 6.645.981.489

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.645.981.489 dan Rp.0

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.34 Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN per satker

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp. 6.645.981.489

C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 6.645.981.489 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	233.331.432
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	206.532.600
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	6.206.117.457
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	6.645.981.489

Tabel C.35 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Utang Kepada Pihak Ketiga Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berupa pembayaran RPATA atas penyelesaian kontrak jasa pegawai *outsourcing* bulan Desember 2025 yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Januari 2026 dengan nomor SP2D 261330000000533 sebesar Rp. 233.331.432.
- Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Utang Kepada Pihak Ketiga Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berupa Pembayaran RPATA Termin 2 atas Kontrak Nomor PJ-PKPTIM 2 Tahun 2025 untuk Kontrak Swakelola Tipe II Pengadaan Pekerjaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Dan Pelayanan Transportasi Pada Angkutan Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026 yang berakhir kontrak per 30 Desember 2025 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Januari 2026 dengan nomor SP2D 261330000000453 sebesar Rp.206.532.600.
- Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
Utang Kepada Pihak Ketiga pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi berupa Pembayaran RPATA atas 3 kontrak Pengolahan dan Analisis Pergerakan Orang Berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD) yang berakhir kontrak per 31 Desember 2025 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Selular, nomor SP2D 261330000002796 dengan nilai kontrak Rp. 1.475.000.001.
2. PT. Indosat Tbk, nomor SP2D 261330000002798, dengan nilai kontrak Rp.2.622.117.456.
3. PT. XL Axiata Tbk, nomor SP2D 261330000002797, dengan nilai kontrak Rp. 2.109.000.000.

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp. 0

C.5.3 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.36 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp. 0

C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp. 0 dan Rp.0 Utang jangka pendek lainnya merupakan utang yang berasal dari Utang pajak bendahara yang namun belum disetorkan ke kas negara.

Ekuitas
Rp. 60.106.689.685

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.106.689.685 dan Rp. 66.023.433.882 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	57.830.114.574
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	549.458.950
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.321.935.094
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	163.424.762
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	241.756.305
Jumlah	60.106.689.685

Tabel C.39 Rincian Nilai Ekuitas per satker

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp.37.790.962

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.37.790.962 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan dari Sewa Kantin Pepustakaan Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp.37.452.500 dan Pendapatan Rumah Dinas pimpinan yang di akui sebagai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.337.899.

	TH 2025	TH 2024	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNB Lainnya	37.790.962	-	-
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	37.790.962	-	-

Tabel D.1 Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

Beban Pegawai
Rp. 46.174.873.348

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.174.873.348 dan Rp. 41.488.904.048.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	46.174.873.348	41.488.904.048	11,29
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	46.174.873.348	41.488.904.048	11,29

Tabel D.2 Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Beban Gaji Pokok PNS	TH 2025	TH 2024
Beban Gaji Pokok PNS	12.674.214.942	12.443.984.850
Beban Pembulatan Gaji PNS	194.184	199.208
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	742.114.780	740.441.274
Beban Tunj. Anak PNS	187.455.470	192.194.872
Beban Tunj. Struktural PNS	474.530.000	477.385.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.425.663.000	1.158.849.000
Beban Tunj. PPh PNS	148.803.878	135.990.746
Beban Tunj. Beras PNS	588.187.480	594.588.200
Beban Uang Makan PNS	2.133.164.000	1.085.242.000
Beban Tunjangan Umum PNS	268.319.942	356.698.319
Beban Gaji Pokok PPPK	1.887.320.500	1.045.608.800
Beban Pembulatan Gaji PPPK	29.893	16.648
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	108.508.800	81.312.280
Beban Tunjangan Anak PPPK	24.881.588	13.832.872
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	194.420.000	173.990.000
Beban Tunjangan Beras PPPK	98.970.380	53.373.540
Beban Uang Makan PPPK	373.010.000	110.845.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	41.885.000	0
Beban Uang Lembur	509.467.000	299.380.000
Beban Uang Lembur PPPK	135.965.000	10.075.000
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21.648.030.705	21.011.943.991
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.537.757.218	1.523.382.860
Jumlah	46.174.873.348	41.488.904.048

Tabel D.3 Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban Persediaan
Rp.829.984.120*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.829.984.120 dan Rp.3.564.800.829. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK/TURUN
Beban Persediaan Konsumsi	829.984.120	3.564.800.829	(76,72)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	829.984.120	3.564.800.829	(76,72)

Tabel D.4 Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024

Beban Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	628.904.400
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	25.084.890
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	56.314.050
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	75.482.800
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	44.197.980
Jumlah	829.984.120

Tabel D.5 Rincian Beban Persediaan per satker

Beban Barang

dan Jasa

Rp. 34.796.762.922

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.34.796.762.922 dan Rp. 63.275.197.557. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa	TH 2025	TH 2024	NAIK/ TURUN %
Beban Keperluan Perkantoran	9.254.412.542	10.655.953.988	-13,2%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	365.578.500	-100,0%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	453.844.000	406.978.000	0,0%
Beban Barang Operasional Lainnya	70.800.000	925.137.000	-92,3%
Beban Bahan	1.324.933.439	5.860.914.038	-77,4%
Beban Honor Output Kegiatan	144.781.000	329.500.000	0,0%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	696.120.313	4.180.540.871	-83,3%
Beban Langganan Listrik	3.947.111.538	4.250.027.825	-7,1%
Beban Langganan Telepon	233.901.275	259.973.673	-10,0%
Beban Langganan Air	389.966.600	251.159.900	55,3%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37.904.170	78.072.547	-51,5%
Beban Jasa Konsultan	6.094.534.318	15.106.134.250	-59,7%
Beban Sewa	1.001.404.779	2.140.114.231	-53,2%
Beban Jasa Profesi	745.070.031	4.222.617.000	-82,4%
Beban Jasa Lainnya	10.389.731.497	14.224.510.734	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	12.247.420	17.985.000	-27,0%
Jumlah	34.796.762.922	63.275.197.557	20,78%

Tabel D.6 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan TA 2024

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	17.909.668.094
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	795.295.542
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.866.715.263
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	13.342.695.991
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	882.388.032
Jumlah	34.796.762.922

Tabel D.7 Rincian Beban Barang dan Jasa per satker

Beban

Pemeliharaan

Rp. 5.155.430.537

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.155.430.537 dan Rp. 9.491.677.067. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2025	TH 2024	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.280.312.347	7.190.096.760	-54,4%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.875.118.190	2.301.580.307	-18,5%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,0%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	0,0%
Jumlah	5.155.430.537	9.491.677.067	-45,7%

Tabel D.8 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

Beban pemeliharaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	4.274.109.494
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	312.976.750
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	240.137.623
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	120.553.321
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	207.653.349
Jumlah	5.155.430.537

Tabel D.9 Beban pemeliharaan per satker

Beban Perjalanan

Dinas

Rp.2.672.718.108

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.672.718.108 dan

Rp.63.405.671.578. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan Beban perjalanan dinas disebabkan oleh menurunnya frekuensi perjalanan dinas akibat adanya efisiensi anggaran.

Beban Perjalanan Dinas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1.616.545.988
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	142.871.166
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi Moda	317.457.496
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	11.784.552
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	584.058.906
Jumlah	2.672.718.108

Tabel D.10 Beban Perjalanan Dinas per satker

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	TH 2025	TH 2024	% Naik (TURUN)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.342.884.414	27.893.735.422	-95,2%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.898.000	856.718.652	-91,6%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	772.259.966	10.500.018.292	-92,6%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	459.973.949	20.966.662.466	-97,8%
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	15.265.904	2.143.432.994	-99,3%
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	-	231.755.770	0,0%
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	10.435.875	813.347.982	-98,7%
	2.672.718.108	63.405.671.578	-95,8%

Tabel D.11 Perbandingan Rincian
Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0- dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK/ TURUN %
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Tabel D.12 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan TA 2024

Beban Bantuan Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

URAIAN	TH 2025	TH 2024	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tabel D.13 Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.6.412.500.577

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.412.500.577 dan Rp. 7.824.383.995.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	5.229.211.304
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	316.637.050
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Intergrasi Moda	569.753.595
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	111.490.605
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	185.408.023
Jumlah	6.412.500.577

Tabel D.14 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per satker

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	TH 2025	TH 2024	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.710.339.395	5.981.073.240	-21,2%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.276.634.768	1.265.421.032	0,9%
Beban Penyusutan Jaringan	383.932.472	383.932.473	0,0%
Beban Amortisasi Software	40.818.625	193.957.250	-79,0%
Beban Penyusutan Aset Tetap TDOP	775.317	-	0,0%
Jumlah	6.412.500.577	7.824.383.995	-18,04%

Tabel D.15 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tabel D.16 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan TA 2024

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 23.250.100

D.11 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2025	TH 2024
Belanja Modal Tanah	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lancar	-40.153.900	-1.002.522.717
Pendapatan Pelepasan Aset Lancar	205.146.100	86.903.400
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	245.300.000	1.089.426.117
Defisit Selisih Kurs	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	63.404.000	1.118.387.997
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	23.250.100	115.865.280

Tabel D.17 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan TA 2024

*) Pendapatan/Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Penyesuaian Nilai Persediaan yang timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2019.

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	62.900.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	72.183.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	- 212.630.000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	100.797.100
Jumlah	23.250.100

Tabel D.18 Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per satker

Pos-Pos Luar Biasa
Rp. 0

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2025	TH 2024	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Pendapatan PNPB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Defisit Pos Luar Biasa	0	0	0,00

Surplus/(Defisit)LO
Rp. (95.981.228.550)

Tabel D.19 Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2025 dan TA 2024

D.13 Surplus/(Defisit) LO

Surplus / (defisit) LO merupakan pendapatan atau beban yang terdapat pada entitas. Rincian Surplus / (defisit) LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.(95.981.228.550) dan Rp.(188.934.769.794).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp. 66.023.433.882

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 66.023.433.882 dan Rp. 68.086.519.093.

Ekuitas awal per satker di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	62.318.551.938
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	867.055.040
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	1.892.319.139
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	518.502.167
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	427.005.598
Jumlah	66.023.433.882

Tabel E.1 Ekuitas awal per satker

Defisit LO

Rp.(95.981.228.550)

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp.(95.981.228.550) dan Rp.(188.934.769.794). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit LO per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	(75.732.622.229)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	(1.520.682.398)
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	(3.050.378.027)
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	(13.874.636.706)
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	(1.802.909.190)
Jumlah	(95.981.228.550)

Tabel E.2 Defisit LO per satker

Koreksi yang

Menambah/

Mengurangi Ekuitas

Rp. 0

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Transaksi Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dan Rp.33.696.000. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah penjumlahan selisih antara penyesuaian nilai aset, koreksi atas

reklasifikasi, koreksi nilai aset non revaluasi dan lain lain pada tahun berjalan. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per satker

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp. 0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Tabel E.4 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp. 0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan

yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Klasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0-.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Reklasifikasi Aset Tak Berwujud	-
Koreksi Reklasifikasi Peralatan dan Mesin	-
Jumlah	-

Tabel E.5 Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp. 0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Aset Non
Revaluasi
Rp. 0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

Tabel E.6 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel E.7 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker

Koreksi Lain-lain
Rp. 0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi lain-lain terdiri dari:

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Tabel E.8 Rincian Koreksi Lain-Lain

Transaksi Antar
Entitas
Rp. 90.064.484.353

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.90.064.484.353 dan Rp. 186.837.988.583 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	90.370.825.415
Diterima dari Entitas Lain	(306.341.062)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	90.064.484.353

Tabel E.9 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	71.244.184.865
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1.203.086.308
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	2.479.993.982
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	13.519.559.301
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1.617.659.897
Jumlah	90.064.484.353

Tabel E.10 Nilai Transaksi Antar Entitas per satker

(DDEL)/(DKEL)
Rp.(306.341.062) /
Rp. 90.370.825.415

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp.(306.341.062) sedangkan DKEL sebesar Rp. 90.370.825.415.

TransferMasuk/
Transfer Keluar
Rp.0/ Rp.0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk/Transfer Keluar posisi 31 Desember 2025 Rp.0.

Pengesahan Hibah
Langsung &
Pengembalian
Hibah Langsung
Rp.0 & Rp.0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp.0.

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
2	Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
		Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Tabel E.11 Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025

Ekuitas Akhir

Rp.60.106.689.685

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.60.106.689.685 dan Rp.66.023.433.882.

Nilai ekuitas akhir per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2025
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	57.830.114.574
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	549.458.950
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.321.935.094
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	163.424.762
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	241.756.305
Jumlah	60.106.689.685

Tabel E.12 Nilai ekuitas akhir per satker

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi terdapat 5 (lima) satuan kerja dengan jumlah rekening masing-masing telah mendapat persetujuan dari KPPN Jakarta IV atas nama masing-masing Satuan Kerja Eselon II di satuan kerja terkait.

No	Kantor/Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	8100122887521000	Bank Mandiri
2	Pusat Kebijakan Sarana Transpo	8100122889441000	Bank Mandiri
3	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	9891542889511000	BNI Cabang Harmoni
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	8100124142671000	Bank Mandiri
5	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	8100126341711000	Bank Mandiri

Tabel F.1 Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Berdasarkan surat permohonan Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker pada PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor KU/202/01/03/BKT/2024 tanggal 17 Januari 2024 untuk satker yang menggunakan rekening BNI dan Nomor KU.202/01/02/BKT/2024 tanggal 17 Januari 2024 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri. Pembukaan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker (*Virtual Account*) telah disetujui oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan sesuai Surat Nomor S-3039/KPN.1204/2024 untuk satker yang menggunakan rekening BNI dan Nomor S-3392/KPN.1204/2024 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Kantor/Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4
1	Badan Kebijakan Transportasi	RKK BALITBANG PERHUBUNGAN KEMENHUB OPS	RKK BAKAN TRANS KEMENHUB OPS
2	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	BPG 133 SEK BALITBANG KEMENHUB	BPG 133 SEK BAKAN TRANS KEMENHUB
3	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	BPG 133 PUSKEBUJAKAN TRANSPORTASI TJP	BPG 133 PUSKAN LATP
4	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	BPG 133 PUSKEBUJAKAN TRANSPORTASI TLSDP	BPG 133 PUSKAN SARANA TRANS
5	Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	BPG 133 TRANSPORTASI UDARA	BPG 133 PUSKAN PRAS TDI
6	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	BPG 133 PUSKEBUJAKAN TRANSPORTASI	BPG 133 PUSKAN KSLMIN DAN TRANS

Tabel F.2 Satker yang menggunakan rekening Mandiri

F.3 Catatan Pengungkapan Penting Lainnya

1. Pejabat Pengelola Keuangan

Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 sebagai berikut:

Satker / Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi		
Kuasa Pengguna Anggaran	Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M.	Januari s.d Maret 2025
	Wicaksono Indarto, S.T., M.T.	Maret s.d Juni 2025
	Rizal, ST.,MA	Juni s.d Des 2025
Pejabat Pembuat Komitmen	Gallen Restu Pradika, S.Ak.	Januari s.d Des 2025
	Anggun Pitaloka, S.M	Januari s.d Des 2025
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Raphael Eldy Pratama Yohanes, S.T.	Januari s.d Des 2025
Bendahara	Ananda Aulia Nurunnisa*, A.P.Kb.N.	Januari s.d Des 2025
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi		
Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Suranto, A.TD., M.T.	Januari s.d Des 2025
Pejabat Pembuat Komitmen	Agung Wicaksono, S.H.	Januari s.d Des 2025
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Didok Sencoko, A.Md.	Januari s.d Des 2025
Bendahara	Muhammad Rizal	Januari s.d Des 2025
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda		
Kuasa Pengguna Anggaran	Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M., M.Tr.T., CGRE.	Januari s.d Des 2025
Pejabat Pembuat Komitmen	Ahmad Ghazali Rizal, S.Kom	Januari s.d Des 2025
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Maya Nirmala Oktaviani, A.Md	Januari s.d Des 2025
Bendahara	Nur Cholifah Rohmani	Januari s.d Des 2025
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan		
Kuasa Pengguna Anggaran	Marwanto Heru Santoso, S. T., M. T	Januari s.d Mei 2025
	M. Arief Affandi, M. Acc., CA	Mei s.d Juni 2025
Pejabat Pembuat Komitmen	Hartono, S. Ap., M. M. Tr.	Januari s.d Des 2025
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Rizky Amanda, S.E.	Januari s.d Des 2025
Bendahara	Nelly Siringoringo, S. E.	Januari s.d Des 2025
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi		
Kuasa Pengguna Anggaran	Jumardi, S.T., MT.	Januari s.d April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran	Bernadette E.S Mayashanti	Mei s.d Des 2025
Pejabat Pembuat Komitmen	Yuliana Permatasari	Januari s.d Juni 2025
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Angela Christalia	Januari s.d Des 2025
Bendahara	Aminullah	Januari s.d Juli 2025
Bendahara	Wuri Dwi Handayani	Agustu s.d Des 2025

Tabel F.3 Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan

2. Pengungkapan Lain-lain masing-masing satker:

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 022.11.1.288752/2025 tanggal 12 Desember 2025 , dan telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali.
- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melakukan koreksi SPM dari akun 522141 ke akun 523111 NO SPM 0041 TA 2025

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi per 31 Desember 2025 telah melaksanakan revisi DIPA ke 5 dalam rangka perubahan anggaran dengan nomor revisi DIPA terakhir: SP DIPA-022.11.1.288944/2025 Revisi ke 5 pada tanggal 13 Oktober 2025 Dengan Tujuan Perubahan Rencana Penarikan Dana Dalam Halaman III DIPA.

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP-DIPA-022.11.1.288951/2025, tanggal 2 Desember 2024 sampai ini telah dilakukan revisi sebanyak 7 kali.

d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-022.11.1.414267/2025 tanggal 2 Desember 2024, dan telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 18 kali.
- Terdapat Perubahan Nomenklatur dari Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan menjadi Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi.

- e. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-022.11.1.634171/2025 tanggal 02 Desember 2024 telah melaksanakan revisi sebanyak 10 kali.

3. Kegiatan Prioritas Nasional

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tidak Ada

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Tidak Ada

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pada tahun 2025 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis), sebagai berikut:

1) Prioritas Nasional V

Untuk Prioritas Nasional V pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda di antaranya melalui program prioritas Sistem Transportasi Pendukung Logistik yang dikembangkan pada 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Prioritas Nasional terkait Observasi Tatanan Transportasi Kawasan Aglomerasi di Ibu Kota Nusantara dan Evaluasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Transportasi dalam Peningkatan Pariwisata Nasional dengan rincian pagu anggaran masing-masing Rp.413.337.000 dan Rp. 474.825.00 dengan realisasi 0% dikarenakan blokir efisiensi Inpres 1 Tahun 2025

f. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Tidak Ada

g. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tidak Ada



BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, 10110

 baketrans.dephub.go.id

 baketrans@kemenhub.go.id

   [baketrans](https://www.facebook.com/baketrans)

AUDITED TA 2025

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1: 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl.Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl.Cetak : 07/07/26 10:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	6,203,030
132111	Peralatan dan Mesin	43,243,630,228
133111	Gedung dan Bangunan	48,664,878,893
134113	Jaringan	13,687,694,174
135121	Aset Tetap Lainnya	2,506,522,165
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(35,662,174,439)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9,844,074,316)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,501,809,598)
162151	Software	1,192,364,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	286,213,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(280,393,852)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,192,364,000)
J U M L A H		60,106,689,685

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/07/26 10:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	43,243,630,228	(41,262,335,281)	5,600,164,842	(35,662,174,439)	7,581,455,789
30103	ALAT BANTU	2,265,779,000	(1,451,910,213)	(323,662,715)	(1,775,592,928)	490,188,072
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10,446,883,000	(8,360,391,914)	(893,353,151)	(9,253,745,065)	1,193,137,935
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	282,638,500	(54,029,825)	(27,791,675)	(81,821,500)	200,817,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	11,922,075	(8,796,315)	(781,440)	(9,577,755)	2,344,320
30303	ALAT UKUR	0	(1,308,690,900)	1,308,690,900	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	93,970,000	(23,492,500)	(23,492,500)	(46,985,000)	46,985,000
30501	ALAT KANTOR	2,385,841,795	(1,855,804,425)	(198,406,722)	(2,054,211,147)	331,630,648
30502	ALAT RUMAH TANGGA	8,760,619,237	(4,942,247,706)	(1,214,565,982)	(6,156,813,688)	2,603,775,549
30601	ALAT STUDIO	3,891,493,530	(2,861,461,998)	(451,668,302)	(3,313,150,300)	578,343,230
30602	ALAT KOMUNIKASI	697,058,500	(4,440,120,202)	3,781,767,102	(658,413,100)	38,645,400
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,748,535,540	(1,662,700,888)	(83,939,402)	(1,746,640,290)	1,895,250
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	20,020,000	(14,013,999)	(1,334,667)	(15,348,666)	4,671,334
30701	ALAT KEDOKTERAN	311,953,000	(150,226,200)	(43,053,800)	(193,282,000)	118,671,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	4,000,000	(3,600,000)	(400,000)	(4,000,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	361,924,280	(906,010,883)	608,159,465	(297,851,398)	64,072,882
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	130,154,000	(85,899,405)	7,212,368	(78,687,037)	51,466,963
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	48,994,000	(544,797,000)	513,300,857	(31,496,143)	17,497,857
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	(466,070,000)	466,070,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	(2,525,600,000)	2,525,600,000	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	300,211,400	(300,211,400)	0	(300,211,400)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	73,379,470	(26,237,170)	(18,344,867)	(46,582,037)	26,797,433
31001	KOMPUTER UNIT	6,940,216,480	(4,328,900,925)	(1,109,736,514)	(5,438,637,439)	1,501,579,021
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,198,608,661	(3,995,676,239)	22,418,142	(3,973,258,097)	225,350,564
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	110,071,000	(38,524,650)	(11,007,100)	(49,531,950)	60,539,050
31501	ALAT DETEKSI	0	(396,330,000)	396,330,000	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	66,143,000	(245,572,250)	182,626,950	(62,945,300)	3,197,700
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	(197,598,500)	197,598,500	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	63,525,000	(35,732,814)	(7,940,825)	(43,673,439)	19,851,561
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	29,688,780	(29,688,780)	0	(29,688,780)	0
133111	Gedung dan Bangunan	48,664,878,893	(8,567,439,548)	(1,276,634,768)	(9,844,074,316)	38,820,804,577
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	48,664,878,893	(8,567,439,548)	(1,276,634,768)	(9,844,074,316)	38,820,804,577
134113	Jaringan	13,687,694,174	(2,117,877,126)	(383,932,472)	(2,501,809,598)	11,185,884,576
50302	INSTALASI AIR KOTOR	5,015,797,674	(835,966,280)	(167,193,256)	(1,003,159,536)	4,012,638,138
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	519,230,700	(183,873,193)	(12,922,571)	(176,795,764)	342,434,936
50402	JARINGAN LISTRIK	8,152,665,800	(1,118,037,653)	(203,616,645)	(1,321,654,298)	6,830,811,502
135121	Aset Tetap Lainnya	2,506,522,165	0	0	0	2,506,522,165

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/07/26 10:42 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
80101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2,506,522,165	0	0	0	2,506,522,165
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	286,213,400	0	(280,393,852)	(280,393,852)	5,819,548
30303	ALAT UKUR	262,953,900	0	(262,953,900)	(262,953,900)	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	23,259,500	0	(17,439,952)	(17,439,952)	5,819,548
JUMLAH		108,388,938,860	(51,947,655,955)	3,659,203,750	(48,288,452,205)	60,100,486,555

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/07/26 10:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	2.199	53,061,892,090	97	1,027,757,240	75	10,846,019,102	2.221	43,243,630,228
30103	ALAT BANTU	2	2,265,779,000	0	0	0	0	2	2,265,779,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	45	10,312,413,000	1	283,620,000	1	149,150,000	45	10,446,883,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	282,638,500	0	0	0	0	5	282,638,500
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	11,922,075	0	0	0	0	2	11,922,075
30303	ALAT UKUR	6	1,308,690,900	0	0	6	1,308,690,900	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	16	93,970,000	0	0	0	0	16	93,970,000
30501	ALAT KANTOR	190	2,340,955,535	12	62,565,760	2	17,679,500	200	2,385,841,795
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,084	8,258,596,867	63	554,470,070	12	52,447,700	1,135	8,760,619,237
30601	ALAT STUDIO	89	3,864,364,780	14	27,128,750	0	0	103	3,891,493,530
30602	ALAT KOMUNIKASI	73	4,550,713,502	0	0	34	3,853,655,002	39	697,058,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	5	1,748,535,540	0	0	0	0	5	1,748,535,540
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1	20,020,000	0	0	0	0	1	20,020,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	120	311,953,000	0	0	0	0	120	311,953,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	1,015,324,280	0	0	1	663,400,000	3	361,924,280
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	17	153,413,500	0	0	3	23,259,500	14	130,154,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	0	0	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	569,294,000	0	0	3	520,300,000	1	48,994,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	735,900,000	0	0	1	735,900,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	2	2,525,600,000	0	0	2	2,525,600,000	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5	300,211,400	0	0	0	0	5	300,211,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	73,379,470	0	0	0	0	2	73,379,470
31001	KOMPUTER UNIT	349	6,868,076,800	6	87,972,660	1	15,833,000	354	6,940,216,460
31002	PERALATAN KOMPUTER	141	4,395,783,661	1	12,000,000	6	209,175,000	136	4,198,608,661
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1	110,071,000	0	0	0	0	1	110,071,000
31501	ALAT DETEKSI	1	396,330,000	0	0	1	396,330,000	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	4	253,143,000	0	0	1	187,000,000	3	66,143,000
31801	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1	197,598,500	0	0	1	197,598,500	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	63,525,000	0	0	0	0	3	63,525,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	25	29,688,780	0	0	0	0	25	29,688,780
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	6	48,664,878,893	0	0	0	0	6	48,664,878,893
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	48,664,878,893	0	0	0	0	6	48,664,878,893
134113	Jaringan	7	13,687,694,174	0	0	0	0	7	13,687,694,174
50302	INSTALASI AIR KOTOR	1	5,015,797,674	0	0	0	0	1	5,015,797,674

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/07/26 10:42 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	519,230,700	0	0	0	0	3	519,230,700
50402	JARINGAN LISTRIK	3	8,152,665,800	0	0	0	0	3	8,152,665,800
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	5,120	2,506,522,165	0	0	0	0	5,120	2,506,522,165
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	5,120	2,506,522,165	0	0	0	0	5,120	2,506,522,165
60601	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0	0	76	11,129,639,102	71	10,843,425,702	5	286,213,400
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	2	432,770,000	2	432,770,000	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	6	1,308,690,900	4	1,046,737,000	2	262,953,900
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	2	17,679,500	2	17,679,500	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	12	62,447,700	12	62,447,700	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	34	3,863,655,002	34	3,863,655,002	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	1	653,400,000	1	653,400,000	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	3	23,259,500	0	0	3	23,259,500
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	0	0	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	3	520,300,000	3	520,300,000	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	1	735,900,000	1	735,900,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	2	2,525,600,000	2	2,525,600,000	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	1	15,833,000	1	15,833,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	6	209,175,000	6	209,175,000	0	0
31501	ALAT DETEKSI	0	0	1	396,330,000	1	396,330,000	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	1	187,000,000	1	187,000,000	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	1	197,598,500	1	197,598,500	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tanggal : 07/07/26 10:42 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60601	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			117,920,987,322		12,157,396,342		21,689,444,804		108,388,938,860

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,233,940,000	12,688,899,000	12,688,898,920	14,683,978	12,674,214,942	99.88	14,684,058
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	224,000	197,000	196,877	2,683	194,194	98.58	2,806
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	762,270,000	743,050,000	743,049,320	934,560	742,114,760	99.87	935,240
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	199,615,000	188,074,000	188,073,874	618,404	187,455,470	99.67	618,530
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	516,185,000	477,780,000	477,780,000	3,250,000	474,530,000	99.32	3,250,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,101,884,000	1,427,129,000	1,427,129,000	1,466,000	1,425,663,000	99.9	1,466,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	40,577,000	148,952,000	148,951,072	147,396	148,803,676	99.9	148,324
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	668,814,000	586,965,000	586,964,100	796,620	586,167,480	99.86	797,520
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,333,124,000	2,173,518,000	2,133,164,000	0	2,133,164,000	98.14	40,354,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	394,380,000	271,480,000	271,480,000	3,160,058	268,319,942	98.84	3,160,058
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	19,251,013,000	18,706,044,000	18,665,687,163	25,059,699	18,640,627,464	99.65	65,416,536
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,020,608,000	1,867,321,000	1,867,320,500	0	1,867,320,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24,000	30,000	29,893	0	29,893	99.64	107
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	101,632,000	106,509,000	106,508,600	0	106,508,600	100	400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	21,255,000	24,882,000	24,881,588	0	24,881,588	100	412
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	166,040,000	194,420,000	194,420,000	0	194,420,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	75,575,000	96,971,000	96,970,380	0	96,970,380	100	620
511628	Belanja Uang Makan PPPK	185,592,000	386,498,000	373,010,000	0	373,010,000	96.51	13,488,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	41,885,000	41,885,000	0	41,885,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,570,726,000	2,718,516,000	2,705,025,961	0	2,705,025,961	99.5	13,490,039
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	2,350,320,000	710,000,000	509,467,000	0	509,467,000	71.76	200,533,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	198,600,000	183,059,000	135,965,000	0	135,965,000	74.27	47,094,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	2,548,920,000	893,059,000	645,432,000	0	645,432,000	72.27	247,627,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	22,258,607,000	22,225,062,000	21,665,310,705	19,280,000	21,646,030,705	97.39	579,031,295
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,457,775,000	2,544,360,000	2,537,757,218	0	2,537,757,218	99.74	6,602,782
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	23,716,382,000	24,769,422,000	24,203,067,923	19,280,000	24,183,787,923	97.64	585,634,077
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	47,087,041,000	47,087,041,000	46,219,213,047	44,339,699	46,174,873,348	98.06	912167652
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,391,148,000	10,975,105,000	9,254,412,542	0	9,254,412,542	84.32	1,720,692,458
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34,800,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	0	0	0	0	0	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	438,960,000	482,794,000	453,844,000	0	453,844,000	94	28,950,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,478,182,000	754,381,000	70,800,000	0	70,800,000	9.39	683,581,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,355,090,000	12,212,280,000	9,779,056,542	0	9,779,056,542	80.08	2,433,223,458
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,870,838,000	2,583,274,000	1,324,933,439	0	1,324,933,439	51.29	1,258,340,561
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	176,000,000	144,781,000	144,781,000	0	144,781,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	605,200,000	1,074,417,000	696,120,313	0	696,120,313	64.79	378,296,687
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	12,249,000	12,247,420	0	12,247,420	99.99	1,580
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,652,038,000	3,814,721,000	2,178,082,172	0	2,178,082,172	57.1	1,636,638,828
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,562,455,000	1,578,463,000	826,903,260	0	826,903,260	52.39	751,559,740
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,562,455,000	1,578,463,000	826,903,260	0	826,903,260	52.39	751,559,740
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	3,696,624,000	3,947,113,000	3,947,111,538	0	3,947,111,538	100	1,462
522112	Belanja Langganan Telepon	679,744,000	368,296,000	233,901,275	0	233,901,275	63.51	134,394,725
522113	Belanja Langganan Air	240,000,000	389,968,000	389,966,600	0	389,966,600	100	1,400
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	329,769,000	235,892,000	37,904,170	0	37,904,170	16.07	197,987,830
522131	Belanja Jasa Konsultan	4,890,370,000	7,049,590,000	6,094,534,318	0	6,094,534,318	86.45	955,055,682
522141	Belanja Sewa	2,023,478,000	1,263,627,000	804,401,979	0	804,401,979	63.66	459,225,021
522151	Belanja Jasa Profesi	2,896,700,000	3,028,515,000	745,070,031	0	745,070,031	24.6	2,283,444,969
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,560,536,000	12,275,555,000	10,389,731,497	0	10,389,731,497	84.64	1,885,823,503
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	20,317,221,000	28,558,556,000	22,642,621,408	0	22,642,621,408	79.28	5,915,934,592
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,880,994,000	3,585,735,000	3,585,663,607	20,735,050	3,564,928,557	99.42	20,806,443
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,560,060,000	2,472,452,000	1,875,118,190	0	1,875,118,190	75.84	597,333,810
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	416,866,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,857,920,000	6,058,187,000	5,460,781,797	20,735,050	5,440,046,747	89.8	618,140,253
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,389,240,000	7,602,722,000	1,342,940,511	56,097	1,342,884,414	17.66	6,259,837,586
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	294,821,000	334,140,000	71,898,000	0	71,898,000	21.52	262,242,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,499,779,000	6,347,211,000	772,259,966	0	772,259,966	12.17	5,574,951,034
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,403,152,000	9,064,241,000	459,973,949	0	459,973,949	5.07	8,604,267,051
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	24,586,992,000	23,348,314,000	2,647,072,426	56,097	2,647,016,329	11.34	20,701,297,671
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	286,653,000	196,821,000	15,265,904	0	15,265,904	7.76	181,555,096

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	541,389,000	77,022,000	10,435,875	0	10,435,875	13.55	66,586,125
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	828,042,000	273,843,000	25,701,779	0	25,701,779	9.39	248,141,221
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	67,159,758,000	75,844,364,000	43,560,219,384	20,791,147	43,539,428,237	57.41	32304935763
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,525,929,000	2,129,612,000	656,523,830	0	656,523,830	30.83	1,473,088,170
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,525,929,000	2,129,612,000	656,523,830	0	656,523,830	30.83	1,473,088,170
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	330,252,000	0	0	0	0	330,252,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	330,252,000	0	0	0	0	330,252,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,525,929,000	2,459,864,000	656,523,830	0	656,523,830	26.69	1803340170
	JUMLAH BELANJA	116,772,728,000	125,391,269,000	90,435,956,261	65,130,846	90,370,825,415	72.07	35,020,443,585

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,233,940,000	12,688,899,000	12,688,898,920	14,683,978	12,674,214,942	99.88	14,684,058
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	224,000	197,000	196,877	2,683	194,194	98.58	2,806
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	762,270,000	743,050,000	743,049,320	934,560	742,114,760	99.87	935,240
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	199,615,000	188,074,000	188,073,874	618,404	187,455,470	99.67	618,530
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	516,185,000	477,780,000	477,780,000	3,250,000	474,530,000	99.32	3,250,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,101,884,000	1,427,129,000	1,427,129,000	1,466,000	1,425,663,000	99.9	1,466,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	40,577,000	148,952,000	148,951,072	147,396	148,803,676	99.9	148,324
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	668,814,000	586,965,000	586,964,100	796,620	586,167,480	99.86	797,520
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,333,124,000	2,173,518,000	2,133,164,000	0	2,133,164,000	98.14	40,354,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	394,380,000	271,480,000	271,480,000	3,160,058	268,319,942	98.84	3,160,058
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	19,251,013,000	18,706,044,000	18,665,687,163	25,059,699	18,640,627,464	99.65	65,416,536
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,020,608,000	1,867,321,000	1,867,320,500	0	1,867,320,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24,000	30,000	29,893	0	29,893	99.64	107
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	101,632,000	106,509,000	106,508,600	0	106,508,600	100	400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	21,255,000	24,882,000	24,881,588	0	24,881,588	100	412
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	166,040,000	194,420,000	194,420,000	0	194,420,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	75,575,000	96,971,000	96,970,380	0	96,970,380	100	620
511628	Belanja Uang Makan PPPK	185,592,000	386,498,000	373,010,000	0	373,010,000	96.51	13,488,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	41,885,000	41,885,000	0	41,885,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,570,726,000	2,718,516,000	2,705,025,961	0	2,705,025,961	99.5	13,490,039
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	2,350,320,000	710,000,000	509,467,000	0	509,467,000	71.76	200,533,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	198,600,000	183,059,000	135,965,000	0	135,965,000	74.27	47,094,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	2,548,920,000	893,059,000	645,432,000	0	645,432,000	72.27	247,627,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	22,258,607,000	22,225,062,000	21,665,310,705	19,280,000	21,646,030,705	97.39	579,031,295
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,457,775,000	2,544,360,000	2,537,757,218	0	2,537,757,218	99.74	6,602,782
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	23,716,382,000	24,769,422,000	24,203,067,923	19,280,000	24,183,787,923	97.64	585,634,077
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	47,087,041,000	47,087,041,000	46,219,213,047	44,339,699	46,174,873,348	98.06	912167652
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,391,148,000	10,975,105,000	9,254,412,542	0	9,254,412,542	84.32	1,720,692,458
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34,800,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	0	0	0	0	0	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	438,960,000	482,794,000	453,844,000	0	453,844,000	94	28,950,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,478,182,000	754,381,000	70,800,000	0	70,800,000	9.39	683,581,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,355,090,000	12,212,280,000	9,779,056,542	0	9,779,056,542	80.08	2,433,223,458
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,870,838,000	2,583,274,000	1,324,933,439	0	1,324,933,439	51.29	1,258,340,561
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	176,000,000	144,781,000	144,781,000	0	144,781,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	605,200,000	1,074,417,000	696,120,313	0	696,120,313	64.79	378,296,687
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	12,249,000	12,247,420	0	12,247,420	99.99	1,580
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,652,038,000	3,814,721,000	2,178,082,172	0	2,178,082,172	57.1	1,636,638,828
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,562,455,000	1,578,463,000	826,903,260	0	826,903,260	52.39	751,559,740
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,562,455,000	1,578,463,000	826,903,260	0	826,903,260	52.39	751,559,740
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	3,696,624,000	3,947,113,000	3,947,111,538	0	3,947,111,538	100	1,462
522112	Belanja Langganan Telepon	679,744,000	368,296,000	233,901,275	0	233,901,275	63.51	134,394,725
522113	Belanja Langganan Air	240,000,000	389,968,000	389,966,600	0	389,966,600	100	1,400
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	329,769,000	235,892,000	37,904,170	0	37,904,170	16.07	197,987,830
522131	Belanja Jasa Konsultan	4,890,370,000	7,049,590,000	6,094,534,318	0	6,094,534,318	86.45	955,055,682
522141	Belanja Sewa	2,023,478,000	1,263,627,000	804,401,979	0	804,401,979	63.66	459,225,021
522151	Belanja Jasa Profesi	2,896,700,000	3,028,515,000	745,070,031	0	745,070,031	24.6	2,283,444,969
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,560,536,000	12,275,555,000	10,389,731,497	0	10,389,731,497	84.64	1,885,823,503
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	20,317,221,000	28,558,556,000	22,642,621,408	0	22,642,621,408	79.28	5,915,934,592
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,880,994,000	3,585,735,000	3,585,663,607	20,735,050	3,564,928,557	99.42	20,806,443
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,560,060,000	2,472,452,000	1,875,118,190	0	1,875,118,190	75.84	597,333,810
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	416,866,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,857,920,000	6,058,187,000	5,460,781,797	20,735,050	5,440,046,747	89.8	618,140,253
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,389,240,000	7,602,722,000	1,342,940,511	56,097	1,342,884,414	17.66	6,259,837,586
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	294,821,000	334,140,000	71,898,000	0	71,898,000	21.52	262,242,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,499,779,000	6,347,211,000	772,259,966	0	772,259,966	12.17	5,574,951,034
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,403,152,000	9,064,241,000	459,973,949	0	459,973,949	5.07	8,604,267,051
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	24,586,992,000	23,348,314,000	2,647,072,426	56,097	2,647,016,329	11.34	20,701,297,671
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	286,653,000	196,821,000	15,265,904	0	15,265,904	7.76	181,555,096

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	541,389,000	77,022,000	10,435,875	0	10,435,875	13.55	66,586,125
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	828,042,000	273,843,000	25,701,779	0	25,701,779	9.39	248,141,221
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	67,159,758,000	75,844,364,000	43,560,219,384	20,791,147	43,539,428,237	57.41	32304935763
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,525,929,000	2,129,612,000	656,523,830	0	656,523,830	30.83	1,473,088,170
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,525,929,000	2,129,612,000	656,523,830	0	656,523,830	30.83	1,473,088,170
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	330,252,000	0	0	0	0	330,252,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	330,252,000	0	0	0	0	330,252,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,525,929,000	2,459,864,000	656,523,830	0	656,523,830	26.69	1803340170
	JUMLAH BELANJA	116,772,728,000	125,391,269,000	90,435,956,261	65,130,846	90,370,825,415	72.07	35,020,443,585

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	90,370,825,415
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	306,341,062	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	205,146,100
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37,452,500
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	337,899
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	63,404,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	563
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,688,898,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	196,877	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	743,049,320	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	188,073,874	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	477,780,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,427,129,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	148,951,072	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	586,964,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,133,164,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	271,480,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,867,320,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29,893	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	106,508,600	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	24,881,588	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	194,420,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	96,970,380	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	373,010,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	41,885,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	509,467,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	135,965,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,665,310,705	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,537,757,218	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,254,412,542	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	453,844,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	70,800,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,324,933,439	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	144,781,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	696,120,313	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,247,420	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	826,903,260	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,947,111,538	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	233,901,275	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	389,966,600	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37,904,170	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	6,094,534,318	0
3.0	522141	Belanja Sewa	804,401,979	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	745,070,031	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	10,389,731,497	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,585,663,607	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,875,118,190	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,342,940,511	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71,898,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	772,259,966	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	459,973,949	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	15,265,904	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	10,435,875	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656,523,830	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	14,683,978
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,683
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	934,560
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	618,404
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	3,250,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,466,000
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	147,396
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	796,620
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,160,058
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	19,280,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	20,735,050
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	56,097
JUMLAH			90,742,297,323	90,742,297,323

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,203,030	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	43,243,630,228	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	48,664,878,893	0
0.0	134113	Jaringan	13,687,694,174	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,506,522,165	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	35,662,174,439
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,844,074,316
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,501,809,598
0.0	162151	Software	1,192,364,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	6,645,981,489	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	286,213,400	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	280,393,852
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,192,364,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	6,645,981,489
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	90,370,825,415
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	306,341,062	0
0.0	391111	Ekuitas	0	66,023,433,882
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	205,146,100
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37,452,500
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	337,899
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	63,404,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	563
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	12,674,214,942	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	194,194	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	742,114,760	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	187,455,470	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	474,530,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,425,663,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	148,803,676	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	586,167,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,133,164,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	268,319,942	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,867,320,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	29,893	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	106,508,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	24,881,588	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	194,420,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	96,970,380	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	373,010,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	41,885,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	509,467,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	135,965,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,646,030,705	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,537,757,218	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,254,412,542	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	453,844,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	70,800,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,324,933,439	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	144,781,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	696,120,313	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,247,420	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,947,111,538	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	233,901,275	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	389,966,600	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37,904,170	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	6,094,534,318	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,001,404,779	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	745,070,031	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	10,389,731,497	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,280,312,347	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,875,118,190	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,342,884,414	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	71,898,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	772,259,966	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	459,973,949	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	15,265,904	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	10,435,875	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,710,339,395	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,276,634,768	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	383,932,472	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	40,818,625	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	775,317	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	829,984,120	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	245,300,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			212,827,398,053	212,827,398,053

Keterangan :
FINAL

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM
Halaman : 1
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	6,203,030	9,283,890	(3,080,860)	(33.19)
JUMLAH ASET LANCAR	6,203,030	9,283,890	(3,080,860)	(33.19)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	43,243,630,228	53,061,892,090	(9,818,261,862)	(18.50)
Gedung dan Bangunan	48,664,878,893	48,664,878,893	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,687,694,174	13,687,694,174	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,506,522,165	2,506,522,165	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(48,006,056,353)	(51,947,655,955)	3,939,597,602	(7.58)
JUMLAH ASET TETAP	60,094,667,107	65,973,331,367	(5,878,664,260)	(8.91)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,192,364,000	2,027,364,000	(835,020,000)	(41.19)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	6,645,981,489	0	6,645,981,489	0.00
Aset Lain-lain	286,213,400	0	286,213,400	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,472,757,852)	(1,986,565,375)	513,807,523	(25.86)
JUMLAH ASET LAINNYA	6,651,801,037	40,818,625	6,610,982,412	16,195.99
JUMLAH ASET	66,752,671,174	66,023,433,882	729,237,292	1.10
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,645,981,489	0	6,645,981,489	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,645,981,489	0	6,645,981,489	
JUMLAH KEWAJIBAN	6,645,981,489	0	6,645,981,489	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	60,106,689,685	66,023,433,882	(5,916,744,197)	(8.96)
JUMLAH EKUITAS	60,106,689,685	66,023,433,882	(5,916,744,197)	(8.96)
JUMLAH EKUITAS	60,106,689,685	66,023,433,882	(5,916,744,197)	(8.96)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	66,752,671,174	66,023,433,882	729,237,292	1.10

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
 ESELON I : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM
 Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	306,341,062	306,341,062	0	0	1,205,291,397	1,205,291,397	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	306,341,062	306,341,062	0	0	1,205,291,397	1,205,291,397	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	306,341,062	306,341,062	0	0	1,205,291,397	1,205,291,397	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	125,391,269,000	90,370,825,415	(35,020,443,585)	72.07	196,457,340,000	188,043,279,980	(8,414,060,020)	95.72
1. Belanja Pegawai	47,087,041,000	46,174,873,348	(912,167,652)	98.06	41,936,254,000	41,488,904,048	(447,349,952)	98.93
2. Belanja Barang	75,844,364,000	43,539,428,237	(32,304,935,763)	57.41	147,709,606,000	139,746,630,921	(7,962,975,079)	94.61
3. Belanja Modal	2,459,864,000	656,523,830	(1,803,340,170)	26.89	6,811,480,000	6,807,745,011	(3,734,989)	99.96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
 ESELON I : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM
 Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	125,391,269,000	90,370,825,415	(35,020,443,585)	72.07	196,457,340,000	188,043,279,980	(8,414,060,020)	95.72
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	66,023,433,882	68,086,519,093	(2,063,085,211)	(3.03)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95,981,228,550)	(188,934,769,794)	92,953,541,244	(49.2)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	33,696,000	(33,696,000)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	33,696,000	(33,696,000)	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	90,064,484,353	186,837,988,583	(96,773,504,230)	(51.8)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,916,744,197)	(2,063,085,211)	(3,853,658,986)	188.79
EKUITAS AKHIR	60,106,689,685	66,023,433,882	(5,916,744,197)	(8.96)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ESELON I

: (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	37,790,962	0	37,790,962	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	37,790,962	0	37,790,962	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	37,790,962	0	37,790,962	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	46,174,873,348	41,488,904,048	4,685,969,300	-
Beban Persediaan	829,984,120	3,564,800,829	(2,734,816,709)	-
Beban Barang dan Jasa	34,796,762,922	63,275,197,557	(28,478,434,635)	-
Beban Pemeliharaan	5,155,430,537	9,491,677,067	(4,336,246,530)	-
Beban Perjalanan Dinas	2,672,718,108	63,405,671,578	(60,732,953,470)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/07/26 10:40 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,412,500,577	7,824,383,995	(1,411,883,418)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	96,042,269,612	189,050,635,074	(93,008,365,462)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(96,004,478,650)	(189,050,635,074)	93,046,156,424	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(40,153,900)	(1,002,522,717)	962,368,817	-
Pendapatan Pelepasan Aset	205,146,100	86,903,400	118,242,700	-
Beban Pelepasan Aset	245,300,000	1,089,426,117	(844,126,117)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	63,404,000	1,118,387,997	(1,054,983,997)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	63,404,000	1,118,387,997	(1,054,983,997)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	23,250,100	115,865,280	(92,615,180)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95,981,228,550)	(188,934,769,794)	92,953,541,244	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95,981,228,550)	(188,934,769,794)	92,953,541,244	-

Keterangan :

FINAL